



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK
BPPMHKP TARAKAN
BADAN PENGENDALIAN PENGAWASAN MUTU HASIL
TAHUN ANGGARAN 2025

FORUM KONSULTASI PUBLIK
BPPMHKP TARAKAN
BADAN PENGENDALIAN PENGAWASAN MUTU HASIL
TAHUN ANGGARAN 2025

TARAKAN

LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Standar Pelayanan

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN

TAHUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sertifikasi Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kota Tarakan dapat terlaksana dengan baik dan laporan ini dapat disusun sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan FKP ini merupakan bagian dari komitmen Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Forum ini menjadi wadah bagi instansi pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta pihak terkait lainnya untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sertifikasi, pengendalian, dan pengawasan hasil perikanan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi dalam upaya perbaikan dan pengembangan pelayanan publik di Standar perikanan, khususnya di Kota Tarakan.

Tarakan, 11 Agustus 2025

Plt. Kepala BPPMHKP Kota Tarakan



Darmansyah, S.Pi

NIP. 197807042008011014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	2
3. Ruang Lingkup	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	4
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	4
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP	5
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Analisis	7
3. Rencana Aksi	7
D. PENUTUP	10

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan publik di bidang sertifikasi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan memiliki peran strategis dalam menjamin mutu, keamanan, dan kelayakan konsumsi produk perikanan, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kota Tarakan, sebagai salah satu sentra perikanan di wilayah Kalimantan Utara, memiliki potensi besar dalam pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan. Oleh karena itu, mutu hasil perikanan yang memenuhi standar nasional dan internasional menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk perikanan daerah.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang ini memiliki kewajiban untuk memastikan proses pelayanan sertifikasi berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dinamika perkembangan industri perikanan, tantangan teknis di lapangan, serta tuntutan dari para pemangku kepentingan memerlukan adanya ruang dialog yang dapat menampung aspirasi dan masukan dari berbagai pihak.

Forum Konsultasi Publik (FKP) hadir sebagai sarana komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan publik dengan para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha perikanan, asosiasi, lembaga pemerintah, media, dan masyarakat. Melalui forum ini, diharapkan terjalin pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur, standar, dan kebijakan pelayanan sertifikasi, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan kualitas layanan.

Penyelenggaraan FKP Standar Pelayanan Sertifikasi Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Kota Tarakan diharapkan dapat menghasilkan komitmen bersama dalam membangun sistem pelayanan publik yang akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah produk perikanan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.

Dasar hukum penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 36 yang mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, pelaksanaan FKP juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum

Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur pelaksanaan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan. Dengan landasan hukum tersebut, pelaksanaan FKP menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Menyediakan wadah komunikasi dan dialog antara penyelenggara pelayanan publik dengan pemangku kepentingan di Standar perikanan.
- 2) Menghimpun aspirasi, masukan, dan saran dari pelaku usaha, asosiasi, lembaga pemerintah, media, dan masyarakat terkait pelayanan sertifikasi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan sertifikasi di lingkungan BPPMHKP Kota Tarakan.
- 4) Menyusun rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan.
- 5) Memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berstandar internasional.

b. Manfaat

- 1) Terbentuknya pemahaman yang selaras antara penyelenggara pelayanan publik dan pemangku kepentingan terkait prosedur dan standar pelayanan sertifikasi.
- 2) Teridentifikasinya kendala, tantangan, dan peluang perbaikan dalam pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan.
- 3) Terwujudnya sistem pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa dan perkembangan industri perikanan.
- 4) Meningkatnya kualitas, mutu, dan daya saing produk perikanan Kota Tarakan di pasar domestik maupun internasional.
- 5) Terbangunnya kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat serta pelaku usaha dalam mendukung peningkatan mutu hasil perikanan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sertifikasi Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kota Tarakan meliputi:

a. Bidang Pelayanan

- 1) Proses sertifikasi hasil perikanan primer dan pascapanen sesuai standar yang berlaku.

- 2) Pengendalian mutu hasil perikanan mulai dari penanganan, penyimpanan, hingga distribusi.
- 3) Pengawasan penerapan persyaratan keamanan pangan dan mutu hasil perikanan di unit usaha.

b. Peserta dan Pemangku Kepentingan

- 1) Instansi pemerintah pusat dan daerah terkait Standar kelautan dan perikanan.
- 2) Pelaku usaha perikanan, asosiasi, dan organisasi profesi.
- 3) Lembaga pengawasan, lembaga sertifikasi, akademisi, media, dan masyarakat umum.

c. Materi Pembahasan

- 1) Evaluasi pelaksanaan pelayanan sertifikasi, pengendalian, dan pengawasan mutu hasil perikanan di Kota Tarakan.
- 2) Identifikasi kendala teknis dan administratif dalam proses pelayanan.
- 3) Penggalan masukan dan rekomendasi perbaikan dari pemangku kepentingan.
- 4) Rencana tindak lanjut untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Standar perikanan.

d. Cakupan Wilayah

Provinsi Kalimantan Utara yang berpusat di Kota Tarakan dan wilayah sekitarnya yang menjadi bagian dari lingkup kerja BPPMHKP Kota Tarakan.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Agustus 2025 pukul 09.00 WITA bertempat di Aula BPPMHKP (Balai KIPM) Tarakan, Lantai III, Jalan Lestari RT. 03, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tarakan. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 25 orang yang terdiri dari:

- a. Instansi pemerintah (Ombudsman, Dinas Perikanan Kota/Kabupaten/Provinsi, Bea Cukai, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan).
- b. Akademisi (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan).
- c. Media (LPP RRI Tarakan).
- d. LSM/Asosiasi (APINDO Kalimantan Utara).
- e. Pelaku usaha/pengguna jasa (perusahaan perikanan, balai benih, kelompok pembudidaya).

Materi disampaikan oleh narasumber perwakilan dari Ombudsman Kalimantan Utara dan BPPMHKP Tarakan yaitu:

- a. Bakuh Dwi T (Perwakilan Ombudsman Kalimantan Utara)
- b. Whidi Anggraeni (Inspektur Mutu Hasil Perikanan)
- c. Fajar Syahputra (Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan)

3. Metode Pelaksanaan FKP

Forum dilaksanakan dengan metode kombinasi daring (online) dan luring (offline) untuk mengakomodasi seluruh peserta.

- a. Pelaksanaan Luring: Berlangsung di Aula BPPMHKP Tarakan untuk peserta yang hadir langsung, dengan rangkaian kegiatan meliputi registrasi peserta, pembukaan, sambutan dan arahan, sesi pemaparan materi, diskusi, penandatanganan berita acara, dan penutupan.
- b. Pelaksanaan Daring: Peserta dari luar daerah mengikuti kegiatan melalui media konferensi video, yang memungkinkan interaksi langsung dalam sesi pemaparan materi dan diskusi.
- c. Teknis Pelaksanaan: Acara diawali dengan registrasi, dilanjutkan pembukaan oleh MC, sambutan dan pembukaan resmi oleh Plt. Kepala Balai KIPM Tarakan,

penyampaian materi oleh narasumber, diskusi interaktif, serta penandatanganan berita acara konsultasi publik sebagai bentuk komitmen bersama.

4. Susunan Acara FKP

- a. Pembukaan.
- b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars KKP.
- c. Sambutan dan Penyampaian Materi sekaligus membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan BPPMHKP Tarakan Tahun 2025 oleh Plt Kepala BPPMHKP Tarakan.
- d. Pembacaan doa.
- e. *Coffee break*.
- f. Penyerahan Sertifikat
- g. Penyampaian materi oleh narasumber
- h. Penayangan video VANI Imut (Aplikasi AI BPPMHKP Tarakan).
- i. Penandatanganan Berita Acara dan Sesi Foto Bersama
- j. Penutup.

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan diskusi dan masukan dari peserta, diperoleh sembilan permasalahan utama sebagai berikut:

a. Minimnya penyebaran informasi mengenai layanan sertifikasi BPPMHKP kepada masyarakat luas.

Informasi terkait jenis layanan, prosedur, dan persyaratan sertifikasi belum tersebar secara merata. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku usaha dan masyarakat belum memahami mekanisme yang harus ditempuh untuk memperoleh sertifikasi mutu hasil perikanan.

b. Mekanisme kompensasi dalam pelayanan publik belum jelas.

Terdapat kebingungan di kalangan pengguna layanan terkait hak memperoleh kompensasi apabila terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian layanan. Pedoman dan prosedur kompensasi belum tersosialisasi secara memadai.

c. Rendahnya pemahaman pembudidaya terkait nilai tambah dari sertifikasi CBIB dan CPIB.

Sebagian pembudidaya belum memahami bahwa sertifikasi tersebut memberikan keuntungan berupa peningkatan harga jual, jaminan keamanan produk, dan akses ke pasar yang lebih luas.

d. Kurangnya pengawasan terhadap peredaran obat ikan dari luar daerah.

Masih ditemukan produk obat ikan yang beredar tanpa registrasi resmi KKP, yang berpotensi menurunkan mutu dan keamanan hasil perikanan.

e. Ketidakseimbangan antara pemberian punishment dan reward dalam pelayanan publik.

Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran relatif lebih tegas dibandingkan pemberian penghargaan, sehingga motivasi untuk meningkatkan kinerja belum optimal.

f. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait perbedaan prosedur dan persyaratan SKP dan HACCP.

Banyak pelaku usaha belum mengetahui bahwa SKP cukup menggunakan GMP dan SSOP untuk pasar domestik, sedangkan HACCP memerlukan dokumen manual HACCP untuk pasar ekspor.

g. Belum semua pelaku usaha memiliki Sertifikat Standar meskipun sudah memiliki NIB.

Rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap kewajiban memiliki Sertifikat Standar menyebabkan keterlambatan pemenuhan regulasi.

h. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pemenuhan standar mutu.

Beberapa pelaku usaha, khususnya skala kecil, mengalami kesulitan memenuhi persyaratan teknis karena keterbatasan peralatan dan fasilitas.

2. Analisis

a. Komunikasi dan Sosialisasi

Kurangnya strategi komunikasi dan minimnya pemanfaatan media massa maupun digital membuat informasi layanan sulit diakses masyarakat luas.

b. Regulasi dan Prosedur

Pedoman kompensasi yang belum terdokumentasi dan tersosialisasi dengan baik menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna layanan.

c. Pemahaman Teknis Pelaku Usaha

Keterbatasan pembinaan teknis dan mutu mengakibatkan rendahnya pengetahuan pelaku usaha terkait manfaat sertifikasi dan prosedur perolehannya.

d. Pengawasan Produk dan Bahan

Sistem pengawasan terhadap obat ikan belum berjalan maksimal, sehingga memungkinkan peredaran produk ilegal yang berisiko terhadap kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan.

e. Motivasi Pelaksana dan Pelaku Usaha

Ketidakseimbangan antara reward dan punishment memengaruhi motivasi pelaksana layanan maupun pelaku usaha untuk mematuhi standar yang berlaku.

f. Standar Infrastruktur

Ketiadaan standar kebutuhan sarana dan prasarana membuat bantuan yang diberikan belum tepat sasaran untuk menunjang pemenuhan persyaratan mutu.

3. Rencana Aksi

a. Peningkatan Sosialisasi

Menjalin kerja sama dengan media lokal seperti RRI Tarakan dan memanfaatkan platform digital BPPMHKP untuk menyebarkan informasi layanan sertifikasi secara luas, terstruktur, dan berkelanjutan.

b. Standardisasi Mekanisme Kompensasi

Menyusun pedoman kompensasi pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan, menetapkan prosedur operasional, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna layanan.

c. Peningkatan Pembinaan Teknis dan Mutu

Melaksanakan pelatihan dan workshop rutin terkait CBIB, CPIB, SKP, dan HACCP, serta menyusun panduan pembinaan teknis dan mutu yang mudah dipahami pelaku usaha.

d. Penguatan Pengawasan

Mengintensifkan inspeksi rutin terhadap peredaran obat ikan dan memastikan hanya produk yang terdaftar di KKP yang beredar di wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

e. Penerapan Reward dan Punishment yang Seimbang

Menyusun indikator kinerja dan memberikan penghargaan bagi pelaku usaha atau pegawai yang berprestasi, sekaligus menerapkan sanksi secara proporsional bagi yang melanggar.

f. Pemenuhan Sertifikat Standar bagi Pemilik NIB

Melaksanakan sosialisasi intensif tentang kewajiban Sertifikat Standar dan menyediakan layanan pendampingan bagi pelaku usaha untuk mempercepat proses perolehannya.

g. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Menyusun dokumen standar kebutuhan sarana dan prasarana pendukung, serta menyalurkan bantuan sesuai kriteria yang telah ditetapkan agar tepat guna.

Identifikasi masalah, rencana aksi dan jangka waktu penyelesaian masalah dituangkan dalam tabel berikut:

No	Identifikasi Masalah	Rencana Aksi	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Minimnya penyebaran informasi mengenai layanan sertifikasi BPPMHKP kepada masyarakat luas	Menjalin kerja sama dengan RRI Tarakan sebagai media kampanye dan sosialisasi layanan sertifikasi	6 bulan
2	Mekanisme kompensasi dalam pelayanan publik belum jelas	Menyusun panduan mekanisme kompensasi dan mengesahkannya oleh pimpinan instansi	1 minggu
3	Pembudidaya mempertanyakan nilai tambah sertifikasi CBIB dan CPIB	Melakukan sosialisasi manfaat sertifikasi dan mendorong dinas memberikan dukungan tambahan bagi pembudidaya tersertifikasi	6 bulan
4	Kurangnya pengawasan peredaran obat ikan dari luar daerah	Melakukan pemantauan rutin dan memastikan penggunaan obat yang telah terdaftar di KKP	6 bulan

5	Ketidakseimbangan antara pemberian punishment dan reward dalam pelayanan publik	Menyusun kebijakan reward dan punishment sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 minggu
6	Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang perbedaan prosedur dan persyaratan SKP dan HACCP	Mengadakan pelatihan dan membuat materi sosialisasi mengenai perbedaan SKP dan HACCP	6 bulan
7	Belum semua pelaku usaha memiliki Sertifikat Standar meskipun sudah memiliki NIB	Melaksanakan sosialisasi wajib Sertifikat Standar dan memfasilitasi pengurusannya	6 bulan
8	Penetapan standar pelayanan dengan acuan terbaru	SK standar pelayanan tahun 2025 dengan nomor B.521/BKIPM.TRK/KP.440/VIII/2025	1 minggu

D. PENUTUP

Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sertifikasi Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kota Tarakan telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil menghimpun berbagai masukan konstruktif dari pemangku kepentingan. Hasil diskusi ini diharapkan menjadi landasan dalam perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Standar perikanan.

BPPMHKP Kota Tarakan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disepakati, memperkuat koordinasi lintas Standar, dan terus mengembangkan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan berdaya saing.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai dokumentasi kegiatan sekaligus acuan dalam peningkatan mutu layanan publik di masa mendatang.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN**

JALAN LESTARI RT. 03 KELURAHAN KARANG HARAPAN KECAMATAN TARAKAN BARAT 77111
TELPON (0551) 3810388, FAKSIMILE (0551) 35803
LAMAN www.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK ski_juata@yahoo.com / skipmtarakan@gmail.com

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR
PELAYANAN SERTIFIKASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
PERIKANAN KOTA TARAKAN**

Pada hari ini, Kamis, 07 Agustus 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Sektor Pelayanan Sertifikasi Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut.

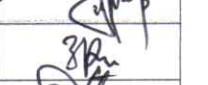
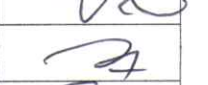
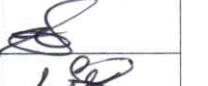
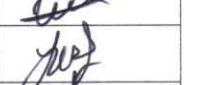
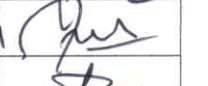
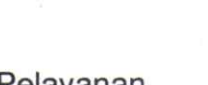
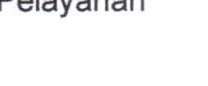
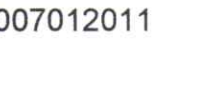
No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Minimnya penyebaran informasi mengenai layanan sertifikasi BPPMHKP kepada masyarakat luas	BPPMHKP siap menjalin kerja sama dengan RRI Tarakan sebagai media kampanye dan sosialisasi layanan sertifikasi	1 bulan
2	Pembudidaya mempertanyakan nilai tambah dari sertifikasi CBIB dan CPIB	Sertifikasi CBIB memberikan nilai tambah berupa peningkatan harga jual dan jaminan keamanan produk. Dinas disarankan memberikan dukungan tambahan bagi pembudidaya tersertifikasi.	1 bulan
3	Kurangnya pengawasan terhadap peredaran obat ikan dari luar daerah	BPPMHKP akan memitigasi peredaran obat dan memastikan penggunaan obat sesuai dengan regulasi yang berlaku	1 bulan
4	Kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai perbedaan prosedur dan persyaratan SKP dan HACCP dan juga antara pembinaan teknis dan pembinaan mutu.	Perlu sosialisasi lebih lanjut dan dibuat panduan atau SOP yang membedakan pembinaan teknis (aspek teknis operasional) dan pembinaan mutu (standar dan sertifikasi).	Sudah ditindak lanjuti

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tarakan, 07 Agustus 2025

No	Nama	No. HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan*
01.	Darmansyah	085247529699	L	BPPMHRP Tarakan	
2	Bakuh D-T	08524731578P	L	Ombudsman Pt.	
3	Harunudin	081250704343	L	Bca Ceko TM	
4	Herwin	08235337183	L	Okp Muv.	
5.	Abu Toni	0825072835	L	PSDIP Tar.	
6.	ANEUT 2.1	085226562685	L	BKHIT KAKTARA	
7	Peni trichyani	085328383355	P	FPIK UBT	
8	Peri widada	08217882477	L	RRI	
9.	Agustine	08128333565	P	Diskam	
10	Niken Triyuni	081334963661	P	Diskam Bulung	
11.	Wendy	08237812333	L	PT-SKA	
12	MUH RINZUAN	08223314435	L	CV. BAREAN	
13	Yusail	08389316162	L	PT-TES	
14	Zanshen B's	085360099461	L	PT.SABINDO	
15	AGUS pangkajene	08125340734	L	PT.MUSIKA	
16	Suyadi Spp.	081250991775	L.	BSU - TARA KAH	
17	SUPERIYANTO	08225151314	L	PEKADAKAN BOMILA	
18.	HASAM LUTFI	085332408024	L	POKORAHANI RAJA LELE KRO	
19	Suryani	082250950727	P.	KUB AMAL JAYA	

Mengetahui/Menyetujui:

Pimpinan Instansi



Darmansyah, S.Pi

NIP.197807042008011014

Penyelenggara Pelayanan



Whidi Anggraeni, S.Pi

NIP.197903012007012011



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN

JALAN LESTARI RT. 03 KELURAHAN KARANG HARAPAN KECAMATAN TARAKAN BARAT 77111
 TELPON (0551) 3810388, FAKSIMILE (0551) 35803
 LAMAN www.kkp.go.id POS ELEKTRONIK ski_juata@yahoo.com / skipmtarakan@gmail.com

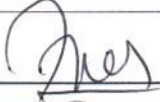
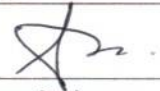
DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 07 Agustus 2025

Tempat : Aula Kantor BPPMHKP Lantai 3

Jenis Kegiatan : Forum Konsultasi Publik

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO. HP	TTD
1	Bakuh Dwi T	Ombudsman M	Kepala Karantina Ikan	0824721570	
2	Peti Wulandari	Len. RRI Tole	Kepala	08217882247	
3	Isnawan Wahyu P.	Bea Cukai	Pelaksana	0812611060	
4	Hanawati	Bea & Cukai	PHC	08135033434	
5	MH RIDZUAN	CV BAREAN	KARIAWAN	0822 33114435	
6	Suyardi	BBU - TARAKAN	Man Ketib	081250951775	
7	Agus Pratomo	PT-MMA	Exek. Deputi	081253407340	
8	Yusuf	PT-TFS	QC	0858 093166	
9	Febri Heruaro	PSDKP Tarakan	Pengawas Perikanan	0853 384 3854	
10	Abdul Hanis	PT-PTK	PTK	08265223	
11	Reni Tri C	FPIK VBT	PTK	085328383355	
12	Margo	RRI	Staf	08135249783	
13	Husain	Dep. Prov.	Kep. PT	08253371183	
14	Agustine	Diklat	K. CLPTD PPKH	08125337569	
15	Wendy	PT-SKA	Karyawati	082317812333	
16	WINARTAN	PT. BOWANZA	HRD	081346583930	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO. HP	TTD
17	SUPRIYANTO	^{BISMILLAH} POKDAKAM	TEKNISI	08215415134	
18	MULYANI	KUB.	semoga berjaya	085249001286	
19	Supriyati	KUB	AMAL JAYA BERATU	08225095072	
20	Adi m doro	OMBUDSMAN	STAFF	08539621678	
21	Zanshen	EXIM Sabirelo	EXIM	085360049161	
22	Hu	"	"	085327099325	
23	HASAN LUTFI	POKDAKAM RAGAT LGE	Ketua Kelomp.	085332408829	
24	ANEVY ZAINUL	BK HIT KALTARA	TDHP	085236562685	
25	Niken Triyani	Dinas Perikanan Buday	Pembina Kelak	081334963661	
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN**

JALAN LESTARI RT. 03 KELURAHAN KARANG HARAPAN KECAMATAN TARAKAN BARAT 77111
TELPON (0551) 3810388, FAKSIMILE (0551) 35803
LAMAM www.kkp.go.id POS ELEKTRONIK ski_juata@yahoo.com / skipmtarakan@gmail.com

Nomor : B.494/BKIPM.TRK/TU.330/VIII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik

01 Agustus 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

di –

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tarakan, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan tersebut, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 07 Agustus 2025
Waktu : Pukul 09.00 WITA
Tempat : Aula BPPMHKP Tarakan, Lantai III

Forum ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan guna mendukung peningkatan kualitas layanan dan kinerja kami di bidang kelautan dan perikanan.

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plt.Kepala Balai KIPM Tarakan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Darmansyah

Lampiran I

Nomor : B.494/BKIPM.TRK/TU.330/VIII/20

Tanggal : 01 Agustus 2025

RUNDOWN ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK STANDAR
PELAYANAN BALAI KIPM TARAKAN

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
Hari/Tanggal : Kamis, 7 Agustus 2025			
Tempat : Aula Balai KIPM Tarakan, Jalan Lestari RT. 03, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara			
1.	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2.	09.00 – 09.15	Pembukaan 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 2. Pembacaan Doa	MC
3.	09.15 – 09.25	Sambutan dan Arahan Plt. Kepala Balai KIPM Tarakan sekaligus membuka Kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Balai KIPM Tarakan	Darmansyah, S.Pi
4.	09.25 – 09.35	<i>Coffe Break</i>	Panitia
5.	09.35 – 11.15	Sesi Pemaparan Materi : 1. Standar Pelayanan Publik Balai KIPM Tarakan 2. Pembahasan Standar Pelayanan Publik Balai KIPM Tarakan	Pemateri dan Pembahas : 1. Whidi Anggraeni, S.Pi dan Fajar Syahputra 2. Maria Ulfa, S.E, M.Si
7.	11.15 – 11.45	Sesi Diskusi	Moderator dan Pemateri
8.	11.45 – 11.55	Penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik Standar Pelayanan Balai KIPM Tarakan	Panitia
9.	11.55 – 12.05	Penutupan Kegiatan	

DAFTAR UNDANGAN

No	Nama Undangan	Keterangan
A. Instansi		
1.	Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara	1 Orang
2.	Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan	1 Orang
3.	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Tarakan	1 Orang
4.	Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara	1 Orang
B. Instansi (Dalam Jaringan)		
5.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara	1 Orang
6.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan	1 Orang
7.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan	1 Orang
8.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau	1 Orang
9.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tana Tidung	1 Orang
C. Akademisi		
10.	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan	1 Orang
D. Media		
11.	Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Tarakan	1 Orang
E. Lembaga Swadaya Masyarakat/Asosiasi		
12.	Ketua APINDO Kalimantan Utara	1 Orang
F. Pengguna Jasa		
13.	Pimpinan PT. Mustika Minanusa Aurora	1 Orang
14.	Pimpinan PT. Sumber Kalimantan Abadi	1 Orang
15.	Pimpinan PT. Bonanza Pratama Abadi	1 Orang
16.	Pimpinan PT. Sabindo Raya Gemilang	1 Orang
17.	Pimpinan PT. Tarakan Fiserindo Sipatuo	1 Orang
18.	Balai Benih Udang Tarakan	1 Orang
19.	Abdul Latif	1 Orang
20.	KUB Maju Bersama	1 Orang
21.	Pokdakan Bismillah Berkah	1 Orang
22.	Pokdakan Raje Lele	1 Orang

Plt. Kepala Balai KIPM Tarakan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Darmansyah

DOKUMENTASI FORUM KONSULTASI PUBLIK 2025









